



# MEWUJUDKAN KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DI DALAM ASTACITA

**Oleh: YUSUF HAKIM GUMILANG SIP, MSi**

TENAGA AHLI KANTOR STAF PRESIDEN BIDANG REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
DISAMPAIKAN DALAM FORUM DENGAN LABORATORIUM 45  
SENIN, 9 DESEMBER 2024



# ARAHAN PRESIDEN RI



"Kita harus mengakui banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran, penyimpangan-penyimpangan, kolusi para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik, jangan takut melihat realita ini.

Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi; dengan perbaikan sistem; dengan penegakan hukum yang tegas; dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan"



Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Pelantikan, 20 Oktober 2024

# ASTA CITA

## PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



**Di dalam ASTACITA butir 7** telah dijelaskan komitmen politik Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Poin ini penting karena menjadi kondisi perlu untuk mewujudkan visi **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

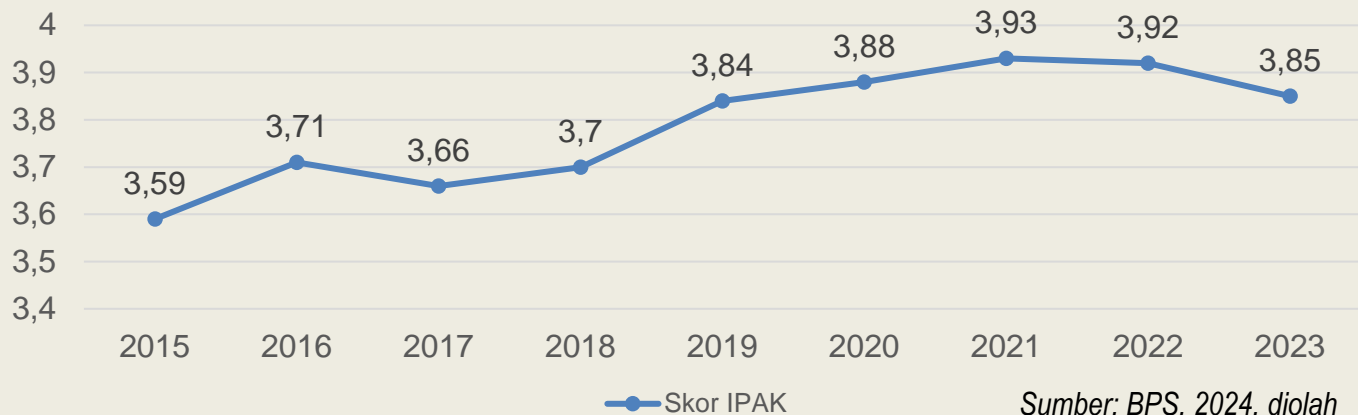
# KINERJA PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014-2024

## Update Data hingga Oktober 2024

Penindakan	Pencegahan	Asset Recovery
<p><b>KPK:</b> Jumlah penindakan yang dilakukan KPK (<i>sampai Januari 2024</i>) periode 2015-2024 KPK melakukan 149 kali OTT, dengan 36 kasus diantaranya dilakukan pada 2020-2024 (KPK, 2024, diolah).</p> <p><b>Kejaksaan Agung</b> Dilakukan penindakan Perkara Pidwas sejumlah 14.701 kasus termasuk mega korupsi tata kelola pertambangan timah dengan kerugian keuangan negara Rp 29 Triliun, dan potensi kerusakan lingkungan Rp 271 Triliun (Kejaksaan, 2024).</p> <p><b>Satgas Saber Pungli</b> Data Agregat kinerja Satgas Saber Pungli sejak 2021 hingga Desember 2023, penindakan pungli yang dilakukan 24.158, dengan Jumlah uang yang telah disita oleh negara adalah Rp 5.9 Miliar. (Satgas, 2024)</p>	<p><b>Strategi Nasional Pencegahan Korupsi</b> telah berdampak langsung kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan <i>dwelling time</i> dari 4 hari menjadi 2.9 hari, dan penurunan <i>port stay</i> 21.6%, berdampak pada efisiensi biaya 46.1% di pelabuhan yang menerapkan digitalisasi data dan proses bisnis layanan pelabuhan melalui INAPORTNET dan INSW. Hal ini juga berdampak pada penurunan biaya logistik dari 24% menjadi 14.29% (Kemenhub, 2024)</li> <li>2. Peningkatan PNBPN ekspor batubara mencapai 118%, melalui pencegahan penyalahgunaan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) untuk menyembunyikan volume ekspor sebenarnya melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). SIMBARA juga membantu peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam penyelesaian piutang negara melalui Automatic Blocking System (ABS) sebesar Rp1,14 triliun. (KPK, 2024)</li> <li>3. Selain itu melalui Stranas PK juga didorong keterpadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Saat ini tingkat kepadanan DTKS dengan NIK mencapai 98.9% (140.201.927 dari 141.704.207 jiwa), sehingga penerima bansos/subsidi ganda atau fiktif dapat dicegah.</li> </ol>	<p><b>Kejaksaan Agung dan KPK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari sisi penyelamatan keuangan negara dari berbagai pengungkapan kasus korupsi besar telah dilakukan Total pengembalian aset atau asset recovery sejak periode 2014-2024 dari Kejaksaan Rp 98.81 Triliun, dan KPK Rp 3.02 (<i>Januari-Juni, 2024</i>).</li> </ol> <p><b>Satgas BLBI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pengembalian hak tagih BLBI hingga Juni 2024 berhasil memulihkan aset BLBI senilai Ro 38. 2 triliun dan tanah bangunan seluas 44.7 juta m<sup>2</sup>.</li> <li>2. Kinerja ini artinya bahwa 34,59% hak tagih negara telah berhasil kembali ke kas negara.</li> </ol>

# INDIKATOR MAKRO

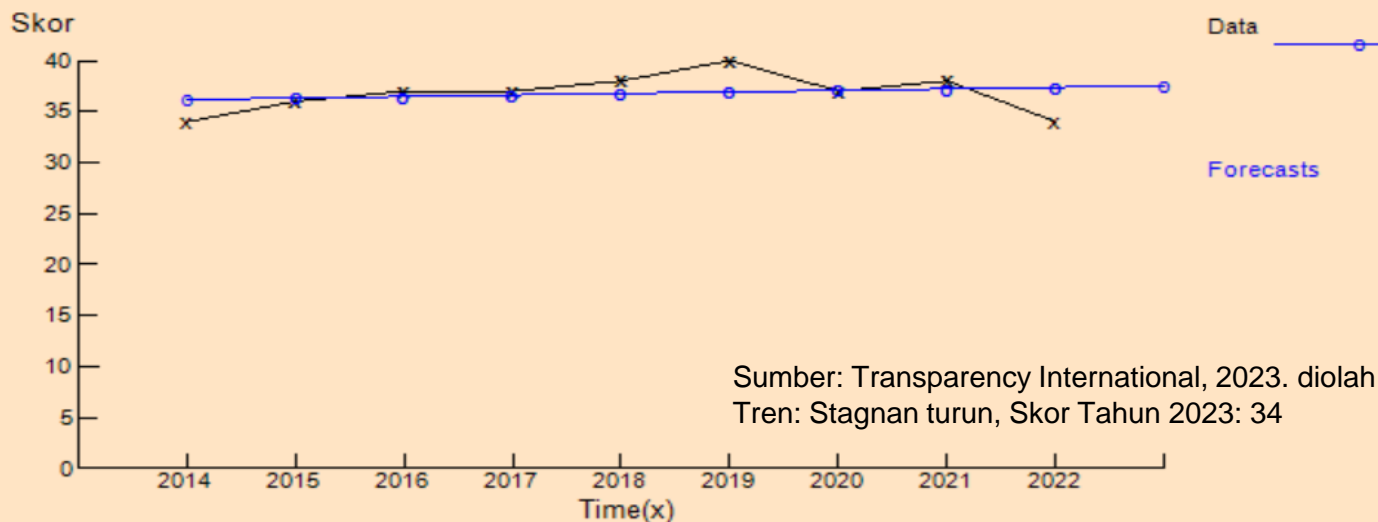
Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi



## Tantangan

- **Ekonomi biaya tinggi.** Antara lain disebabkan oleh masih tingginya biaya logistik di Indonesia (*Logistic Performance Index* Indonesia skor 3.0, turun dibanding tahun 2018 skor 3.15) (World Bank, 2023)
- **Masih terjadi pungli dalam Pelayanan publik.** Sejak 2016 hingga Desember 2022 terdapat 38 ribu laporan pungli, dengan total barang bukti Rp 22.2 miliar (Satgas Saber Pungli, 2022)
- **Skor IPAK & IPK** menurun sejak Revisi UU KPK (kembali ke skor 34 seperti tahun 2014)
- **Kondisi Pemberantasan Korupsi.** Persepsi publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi masih cukup terjaga (51.4%) dibandingkan yang berpersepsi buruk (42.9%), (Survey Indikator, Oktober 2023)

Indeks Persepsi Korupsi



## 17 Program Prioritas Presiden

- 1 Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
- 2 Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- 3 Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 4 Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 5 Pemberantasan kemiskinan
- 6 Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- 7 Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
- 8 Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
- 9 Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
- 10 Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- 11 Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 12 Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
- 13 Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
- 14 Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
- 15 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
- 16 Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
- 17 Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

# ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS DALAM RKP 2025

No	Arah Kebijakan dalam RKP 2025 (Penjabaran dari Asta Cita)	Bidang	Renaksi Prioritas (RKP 2025)
1	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi politik, (b) reformasi hukum, (c) pencegahan dan pemberantasan korupsi, (d) penguatan kelembagaan hukum, serta (e) transformasi sistem penuntutan (advocaat general).	<b>Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi</b>	<p>Pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan melalui (a) budaya antikorupsi, (b) pencegahan tindak pidana korupsi, dan (c) pemberantasan tindak pidana korupsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Implementasi Stranas Pencegahan Korupsi</li> <li>Penguatan Implementasi Satgas Saber Pungli</li> </ol>
2	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi tata kelola pemerintahan, (b) inklusivitas dan transformasi digital layanan publik, dan (c) perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia, dan keamanan insani.	<b>Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi</b>	<p>Reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan melalui (a) manajemen penghargaan dan pengakuan berbasis kinerja sumber daya manusia aparatur; (b) penguatan manajemen talenta dan karier aparatur sipil negara; (c) penguatan kepemimpinan, budaya kerja, dan citra institusi; (d) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (e) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional; (h) penataan desentralisasi dan otonomi daerah; serta (i) penguatan manajemen kinerja pembangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Services) yang Terintegrasi</li> </ol>

## Sasaran Utama

*Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi*

Target:



**Indeks Persepsi Korupsi**

**38**  
(2025)

**43,7**  
(2029)



**Indeks Integritas Nasional**

**74,52**  
(2025)

**77,57**  
(2029)



## KANTOR STAF PRESIDEN

Salah satu prioritas di dalam Asta Cita Nomor 7 adalah terkait penguatan pemberantasan korupsi. Hal ini dapat diwujudkan melalui strategi strategi pencegahan korupsi melalui Stranas PK.

Oleh karena itu, Penguatan implementasi Stranas PK dapat dilakukan oleh KSP sebagai tim pengarah Stranas PK melalui:

1. Memperkuat dukungan teknokrasi melalui perencanaan dan *debottlenecking* aksi pencegahan korupsi yang mendukung Asta Cita dan Program strategis pemerintah, misalnya terkait isu pencegahan kebocoran penerimaan negara, Efektivitas Subsidi Pemerintah termasuk untuk Makan Siang Bergizi, dan efisiensi dalam proses Pengadaan Barang Jasa;
2. Memperkuat dukungan politik melalui pelaporan secara langsung Timnas PK kepada Presiden, setiap 3 bulan sekali, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.





**TERIMA KASIH**